



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.632, 2018

KEMEN-KUKM. Klasifikasi Keamanan dan Akses
Arsip Dinamis.

PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 05 TAHUN 2018
TENTANG
KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOPERASI DAN
USAHA KECIL DAN MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin penciptaan dan ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya, terwujudnya akses arsip dan perlindungan terhadap keamanan arsip serta untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan arsip oleh pihak lain, perlu diatur dalam suatu Peraturan Menteri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 1993, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
9. Peraturan Presiden Nomor 07 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
10. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2015 tentang Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 106);

11. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 08/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1555);
12. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembuatan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH TENTANG KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
2. Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip yang dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
3. Unit Pengolah adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah semua arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan arsip di lingkungannya.
4. Unit Kearsipan adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan.
5. Akses Arsip adalah ketersediaan arsip sebagai hasil dari kewenangan hukum dan otorisasi legal serta

- keberadaan sarana bantu untuk mempermudah penemuan dan pemanfaatan arsip.
6. Klasifikasi adalah proses identifikasi kategori kegiatan dan arsip dinamis yang dihasilkan dan mengelompokkannya.
 7. Klasifikasi Keamanan Arsip adalah kategori kerahasiaan informasi arsip berdasarkan pada tingkat keseriusan dampak yang ditimbulkannya terhadap kepentingan dan keamanan negara, masyarakat dan perorangan.
 8. Klasifikasi Akses Arsip adalah kategori pembatasan akses terhadap arsip berdasarkan kewenangan penggunaan arsip terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi tertentu.
 9. Pengamanan Arsip adalah program perlindungan fisik dan informasi arsip berdasarkan klasifikasi keamanannya.
 10. Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis adalah merupakan aturan pembatasan hak akses terhadap fisik dan informasinya sebagai dasar untuk menentukan keterbukaan atau kerahasiaan arsip dalam rangka melindungi hak dan kewajiban pencipta arsip dari pengguna dalam pelayanan arsip.
 11. Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah selanjutnya disebut Klasifikasi KAAD di lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM.
 12. Biasa/Terbuka adalah arsip yang memiliki informasi apabila diketahui oleh orang banyak tidak merugikan siapapun.
 13. Terbatas adalah arsip yang memiliki informasi apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.
 14. Rahasia adalah arsip yang memiliki informasi apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, ketertiban umum,

termasuk dampak ekonomi makro. Apabila informasi yang terdapat pada arsip bersifat sensitif bagi lembaga/organisasi akan menimbulkan kerugian yang serius terhadap privacy, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi.

15. Arsip Sangat Rahasia adalah arsip yang memiliki informasi apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan bangsa.
16. Informasi yang Dikecualikan adalah informasi yang apabila dibuka atau diketahui orang lain dapat menimbulkan konsekuensi. setelah dipertimbangkan secara seksama bahwa dengan menutup informasi dapat melindungi kepentingan yang lebih besar dari pada membukanya.
17. Penggunaan Arsip adalah kegiatan penyediaan dan pemanfaatan arsip bagi kepentingan pengguna arsip yang berhak.
18. Pengguna Internal adalah setiap orang atau unit kerja yang menggunakan arsip dan berasal dari lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
19. Pengguna Eksternal adalah setiap orang atau badan hukum yang menggunakan arsip dan berasal dari luar lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
20. Prosedur Pengaksesan Informasi Publik adalah tata cara atau aturan ketersediaan informasi sesuai kewenangan hukum dan otorisasi legal pemanfaatan informasi publik.
21. Menteri adalah pejabat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
22. Pejabat Pengelola Informasi Publik (PPID) Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyediaan dan/atau

pelayanan informasi di badan publik yang ditunjuk oleh Menteri.

Pasal 2

- (1) Klasifikasi KAAD di lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM dimaksudkan untuk:
 - a. mendorong unit kerja agar memberkaskan Arsip Dinamis unit kerjanya secara tertib yang disertai dengan daftar arsip aktifnya;
 - b. memberikan petunjuk kepada unit kerja agar dapat mengamankan dan mematuhi kewenangan Akses terhadap klasifikasi informasi Arsip yang telah ditetapkan;
 - c. melindungi fisik dan informasi Arsip dari kerusakan dan kehilangan sehingga ketersediaan, keterbacaan, keutuhan, otentisitas dan realibilitas Arsip dapat tetap terjaga; dan
 - d. melindungi Arsip dari pengaksesan yang tidak sesuai aturan sehingga dapat dicegah terjadinya penyalahgunaan arsip oleh pihak yang tidak berhak untuk tujuan dan kepentingan yang tidak sah.
- (2) Klasifikasi KAAD di lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM bertujuan untuk:
 - a. menjadi acuan pelaksanaan dalam pengelolaan arsip dinamis di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
 - b. menyediakan layanan informasi arsip dinamis kepada publik dengan prinsip cepat, tepat, murah, dan aman;
 - c. tersedianya informasi Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang dikategorikan terbuka dan dapat diakses seluas-luasnya bagi publik sesuai dengan lampiran Klasifikasi KAAD;
 - d. terjaminnya keamanan arsip bagi informasi yang dikecualikan; dan

- e. terciptanya kenyamanan bekerja bagi seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

Pasal 3

Ruang lingkup Klasifikasi KAAD di lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM meliputi:

- a. Klasifikasi Keamanan Arsip, memuat informasi biasa/terbuka, terbatas dan rahasia;
- b. Pengamanan Arsip, memuat pengamanan ruang simpan, penentuan pengelola arsip, serta daftar informasi terbatas, rahasia; dan
- c. Klasifikasi dan Pengaturan Akses Arsip, memuat pengguna internal dan pengguna eksternal.

Pasal 4

- (1) Asas Klasifikasi KAAD di lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM dilaksanakan dengan menerapkan asas gabungan.
- (2) Asas gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui sentralisasi dalam penetapan kebijakan dan desentralisasi dalam pelaksanaan di lapangan.
- (3) Penetapan Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyusunan dan penerapan pedoman serta standar operasional prosedur, sumber daya manusia, sarana dan prasarana.

Pasal 5

Klasifikasi KAAD di lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Arsip yang tercipta di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dapat diklasifikasikan menjadi informasi atau arsip Biasa/Terbuka, Terbatas dan Rahasia;
- b. ketiga tingkat klasifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, berbeda dalam teknis pengamanannya,

- semakin tinggi tingkat klasifikasi informasinya semakin tinggi pula tingkat pengamanannya;
- c. ketiga tingkat klasifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, berbeda dalam pengaturan aksesnya, semakin tinggi tingkat klasifikasi informasinya semakin ketat pula dalam pengaturan aksesnya;
 - d. setiap pegawai Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah hanya dapat mengakses Arsip yang berada pada tanggung jawab tugas dan kewenangannya; dan
 - e. publik dapat mengakses informasi Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang dikategorikan biasa/terbuka sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.

Pasal 6

- (1) Arsip Dinamis di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dapat diakses oleh Pengguna Internal dan Pengguna Eksternal.
- (2) Pengguna Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Menteri, sebagai pimpinan tingkat tertinggi, dapat mengakses seluruh Arsip yang berada di bawah kewenangannya;
 - b. Sekretaris Kementerian, deputy, dan inspektur, sebagai pimpinan tingkat tinggi, dapat mengakses Arsip di bawah kewenangannya, tapi tidak dapat mengakses informasi yang terdapat pada pimpinan level tertinggi dan yang satu level dengan unit di luar unit kerjanya, kecuali telah mendapatkan izin;
 - c. staf ahli, sebagai pimpinan tingkat tinggi, dapat mengakses seluruh Arsip sesuai dengan bidangnya setelah mendapatkan izin dari pimpinan tinggi yang terkait;
 - d. pejabat eselon II dan pejabat eselon III, sebagai pimpinan tingkat menengah, dapat mengakses seluruh arsip dibawah kewenangannya, namun

- tidak dapat mengakses informasi yang terdapat pada pimpinan level tertinggi dan yang satu level di luar unit kerjanya, kecuali telah mendapatkan izin;
- e. pejabat eselon IV, arsiparis, dan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai pejabat pelaksana, hanya dapat mengakses seluruh Arsip yang berada pada tanggung jawab, tugas dan kewenangannya, dengan tingkat klasifikasi biasa; dan
 - f. pengawas internal mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh Arsip pada pencipta Arsip dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan internal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (3) Pengguna Eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut;
- a. pengawas eksternal mempunyai hak untuk mengakses seluruh Arsip pada pencipta Arsip dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. aparat penegak hukum mempunyai hak untuk mengakses arsip pada pencipta arsip yang terkait dengan perkara atau proses hukum yang sedang ditanganinya untuk melaksanakan fungsi penegak hukum; dan
 - c. publik dapat mengakses informasi Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang dikategorikan terbuka sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.

Pasal 7

- (1) Sarana Klasifikasi KAAD di lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM menggunakan sarana perangkat keras (*hardware*) dan perangkat lunak (*software*).
- (2) Perangkat keras (*hardware*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. sarana penyimpanan arsip konvensional berupa *filling cabinet*/rak arsip untuk menyimpan Arsip Biasa/Terbuka dan Arsip Terbatas, dan brankas atau lemari besi untuk Arsip Rahasia;
 - b. sarana penyimpanan Arsip media baru berupa lemari Arsip sesuai dengan tingkat klasifikasi informasi; dan
 - c. prasarana berupa ruang penyimpanan yang representatif sesuai dengan tingkat klasifikasi informasi.
- (3) Perangkat lunak (*software*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. daftar arsip aktif, inaktif, terjaga dan vital; dan
 - b. aplikasi pengelolaan arsip aktif dan inaktif.

Pasal 8

- (1) Pejabat fungsional arsiparis dan/atau pengelola arsip yang bertugas mengelola arsip harus dipilih pegawai yang profesional baik dalam substansi kearsipan maupun dalam dedikasi dan integritas.
- (2) Pejabat fungsional arsiparis dan/atau pengelola Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditetapkan melalui Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

Pasal 9

Arsip Dinamis Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah terbagi menjadi 3 (tiga) kategori, sebagai berikut:

- a. Arsip Biasa/Terbuka;
- b. Arsip Terbatas; dan
- c. Arsip Rahasia.

Pasal 10

Arsip Dinamis di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang termasuk ke dalam kategori Arsip Biasa/Terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a merupakan Arsip yang tidak memiliki dampak yang

dapat mengganggu kinerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah:

- a. Arsip Dinamis di lingkungan Sekretariat Kementerian meliputi Biro Perencanaan, Biro Keuangan dan Biro Umum;
- b. Arsip Dinamis di lingkungan Deputy Bidang Kelembagaan meliputi Sekretariat Deputy Bidang Kelembagaan, Asisten Deputy Penyuluhan, Asisten Deputy Organisasi dan Badan Hukum Koperasi, Asisten Deputy Penerapan Peraturan Perundang-undangan, Asisten Deputy Tata Laksana Koperasi dan UMKM, dan Asisten deputy Keanggotaan;
- c. Arsip Dinamis di lingkungan Deputy Bidang Pembiayaan meliputi Sekretariat Deputy Bidang Pembiayaan, Asisten Deputy Simpan Pinjam, Asisten Deputy Permodalan, Asisten Deputy Asuransi, Penjaminan dan Pasar Modal, Asisten Deputy Pembiayaan Non Bank dan Perpajakan, dan Asisten Deputy Pembiayaan Syariah;
- d. Arsip Dinamis di lingkungan Deputy Bidang Produksi dan Pemasaran meliputi Sekretariat Deputy Bidang Produksi dan Pemasaran, Asisten Deputy Bidang Pertanian dan Perkebunan, Asisten Deputy Perikanan dan Peternakan, Asisten Deputy Industri dan Jasa, Asisten Deputy Standardisasi dan Sertifikasi, dan Asisten Deputy Pemasaran;
- e. Arsip Dinamis di lingkungan Deputy Bidang Restrukturisasi Usaha, meliputi Sekretariat Deputy Bidang Restrukturisasi Usaha, Asisten Deputy Pemetaan Kondisi dan Peluang Usaha, Asisten Deputy Pendampingan Usaha, Asisten Deputy Pengembangan dan Penguatan Usaha, Asisten Deputy Perlindungan Usaha, dan Asisten Deputy Pengembangan Investasi Usaha;
- f. Arsip Dinamis di lingkungan Deputy Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia, meliputi Sekretariat Deputy Bidang Sumber Daya Manusia, Asisten Deputy Peningkatan Kualitas SDM

Perkoperasian, Asisten Deputi Standardisasi dan Sertifikasi SDM Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Asisten Deputi Pengembangan Kewirausahaan, Asisten Deputi Pengembangan Peran Serta Masyarakat, dan Asisten Deputi Penelitian dan Pengkajian Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

- g. Arsip Dinamis dari lingkungan Deputi Bidang Pengawasan, meliputi Sekretariat Deputi Bidang Pengawasan, Asisten Deputi Kepatuhan, Asisten Deputi Pemeriksaan Kelembagaan, Asisten Deputi Pemeriksaan Usaha Simpan Pinjam, Asisten Deputi Penilaian Kesehatan Usaha Simpan Pinjam, dan Asisten Deputi Penerapan Sanksi; dan
- h. Arsip Dinamis dari lingkungan Inspektorat.

Pasal 11

Arsip Dinamis di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang termasuk ke dalam kategori Arsip Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b merupakan Arsip yang dari segi bobot informasinya memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja unit teknis di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, yang meliputi:

- a. Arsip Dinamis yang tercipta dari kegiatan administrasi bagian Kepegawaian seperti *personal file*, hasil pertimbangan Baperjakat (Badan Pertimbangan Jabatan dan Pangkat), rekam medis pegawai;
- b. Arsip dinamis yang tercipta dari kegiatan administrasi bagian perlengkapan seperti dokumen pengandaan barang Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- c. Arsip Dinamis yang tercipta dari kegiatan administrasi Inspektorat seperti laporan hasil pemeriksaan auditor internal dan eksternal, laporan hasil pemeriksaan auditor independen;

- d. Arsip Dinamis yang tercipta dari kegiatan administrasi Biro Keuangan seperti berkas pengelolaan anggaran di unit kerja; dan
- e. Arsip Dinamis yang tercipta dari kegiatan administrasi Bagian Arsip seperti daftar arsip vital dan daftar arsip terjaga.

Pasal 12

Arsip Dinamis di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang termasuk ke dalam kategori Arsip Rahasia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, mengandung dampak yang luas hingga mengganggu kinerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah meliputi:

- a. Arsip Dinamis yang tercipta dari Unit Organisasi, Kepegawaian dan Hukum seperti kasus/sengketa hukum, Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI), dan *personal file*;
- b. Arsip dinamis yang tercipta dari Biro Umum antara lain sertifikat tanah, rancang bangun instalasi telepon, instalasi listrik, daftar arsip vital, dan lain-lain; dan
- c. Arsip Dinamis yang tercipta dari Deputi Pengawasan seperti tindak lanjut hasil pengawasan.

Pasal 13

- (1) Ruang penyimpanan Arsip Dinamis secara keseluruhan dilengkapi fasilitas pengamanan antara lain berupa pemasangan kamera pengawas (CCTV), kunci pengamanan ruangan, dan media simpan arsip.
- (2) Untuk menjaga keamanan arsip dilakukan hal sebagai berikut:
 - a. Arsip Biasa/Terbuka disimpan pada rak besi;
 - b. Arsip Terbatas disimpan pada *filling cabinet* atau lemari besi, dan
 - c. Arsip Rahasia disimpan pada lemari besi atau brankas.

Pasal 14

- (1) Pengelola arsip dilakukan pejabat fungsional arsiparis dan/atau penata arsip di masing-masing unit pengolah.
- (2) Arsiparis dan/atau penata arsip sebagai pengelola Arsip Aktif berperan dalam pengamanan Arsip di unit pengolah (*central file*).
- (3) Arsiparis dan/atau penata arsip sebagai pengelola Arsip Inaktif berperan dalam pengamanan Arsip di pusat arsip (*records centre*) Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

Pasal 15

- (1) Pengamanan informasi Arsip Dinamis di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah meliputi penciptaan daftar Arsip Terbatas dan daftar Arsip Rahasia.
- (2) Tujuan pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) merupakan acuan pembatasan akses yang digunakan oleh penyedia informasi yang berada di unit pengolah (*central file*) dan di unit kearsipan (*records centre*).

Pasal 16

Tabel klasifikasi keamanan dan pengamanan akses arsip dinamis di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah terbagi atas fasilitatif dan substantif tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 17

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Mei 2018

MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL
DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA

ttd

AAGN. PUSPAYOGA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Mei 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN :
PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 05 TAHUN 2018
TENTANG
KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS DILINGKUNGAN KEMENTERIAN
KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

A. FUNGSI FASILITATIF

NO.	KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN/ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
I. KEPEGAWAIAN (KP)						
1.	KP.00	Persediaan Pegawai/Bezetting	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Bagian Kepegawaian
	KP.00.00	1 Data Pegawai hasil pengklasifikasian				
	KP.00.01	2 Kajian data pegawai				
	KP.00.02	3 Konsep data bezetting				
	KP.00.03	4 Evaluasi proses penyusunan data bezetting				
	KP.00.04	5 Hasil dan laporan data bezetting				
2.	KP.01	Formasi Pegawai	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Bagian Kepegawaian
	KP.01.00	1 Usulan dari Unit Kerja				
		a Analisis Jabatan				
		b Beban Kerja				
	KP.01.01	2 Usulan Permintaan Formasi kepada Menpan dan RB dan Kepala BKN				
	KP.01.02	3 Persetujuan Formasi dari Menpan dan RB				
	KP.01.03	4 Penetapan Formasi PNS				
	KP.01.04	5 Penetapan Formasi Khusus				
3.	KP.02	Pengadaan Pegawai	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Bagian Kepegawaian
	KP.02.00	1 Proses Penerimaan Pegawai meliputi :				
		a Pengumuman				
		b Seleksi administrasi				
		c Penganggilan peserta tes				
		d Pelaksanaan ujian tertulis				
		e Keputusan hasil ujian tertulis				
		f Pelaksanaan ujian kesehatan				
		g Pelaksanaan tes kemampuan bidang				
		h Wawancara				
		i Keputusan kelulusan				
		j Pengumuman kelulusan				
	KP.02.01	2 Penetapan Pengumuman Kelulusan	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Bagian Kepegawaian

- 17 -

NO.	KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN/ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	KP.02.02	3 Berkas Lamaran yang Tidak Diterima	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Bagian Kepegawaian
	KP.02.03	4 Nota Usul dan Kelengkapan Penetapan NIP	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Biro Umum
		a Surat lamaran				
		b Ijazah				
		c SKCK				
		d Kartu Kuning				
		e Surat keterangan kesehatan				
	KP.02.04	5 Nota Usul Pengangkatan CPNS menjadi PNS Lebih 2 Tahun	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Biro Umum
	KP.02.05	6 Surat Keputusan CPNS/PNS Kolektif	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Bagian Kepegawaian
4.	KP.03	Pembinaan Karir Pegawai	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Bagian Kepegawaian
	KP.03.00	1 Diklat/Kursus/Magang/Ujian Dinas/Izin Belajar Pegawai/Ujian Penyesuaian Ijazah				
		a Surat Perintah/Surat Tugas/SK/Surat Izin				
		b Laporan Kegiatan Pengembangan Diri				
	KP.03.01	2 Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan (STTFL)/Sertifikat	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Bagian Kepegawaian
	KP.03.02	3 Ujian Kompetensi	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Biro Umum
		a Assesment Test Pegawai				
		b Pemetaan/Mapping Talent Pegawai				
	KP.03.03	4 Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) bagi PNS	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Biro Umum
	KP.03.04	5 Pakta Integritas Pegawai	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Bagian Kepegawaian
	KP.03.05	6 Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN)	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas	Biro Umum

NO.	KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN/ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
					dan fungsi Kementerian KUKM	
	KP.03.06	7 Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK)	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Biro Umum
	KP.03.07	8 Pembinaan Mental Pegawai	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Bagian Kepegawaian
	KP.03.08	9 Disiplin Pegawai a Daftar Hadir b Rekapitulasi Daftar Hadir	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Biro Umum
	KP.03.09	10 Berkas Hukuman Disiplin	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Biro Umum
	KP.03.10	11 Penghargaan dan Tanda Jasa	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Bagian Kepegawaian
5.	KP.04	Penyelesaian Pengelola Keberatan Pegawai	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Biro Umum
6.	KP.05	Mutasi Pegawai				
	KP.05.00	1 Alih Status, Pindah Instansi, Pindah Wilayah Kerja, Diperbantukan, Dipekerjakan, Mutasi Antar Unit Kerja, Mutasi ke Balai/UPT	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Biro Umum
	KP.05.01	2 Nota Persetujuan/Pertimbangan Kepala BKN dan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Bagian Kepegawaian
	KP.05.02	3 Berita Acara Pelantikan dan Serah Terima Jabatan	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Biro Umum
	KP.05.03	4 Mutasi Keluarga a Surat Izin Pernikahan/Perceraian b Surat Penolakan Izin c Akta Nikah/Cerai d Akta Kelahiran Anak	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Biro Umum

NO.	KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN/ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		e Surat Keterangan Meninggal Dunia				
	KP.05.04	5 Usul Kenaikan Pangkat/Golongan/Jabatan Struktural dan Fungsional	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Biro Umum
	KP.05.05	6 Usulan Pengangkatan dan Pemberhentian dalam Jabatan Struktural/Fungsional	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Biro Umum
	KP.05.06	7 Usul Penetapan Perubahan Data Dasar/Status/Kedudukan Hukum Pegawai	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Biro Umum
	KP.05.07	8 Peninjauan Masa Kerja	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Bagian Kepegawaian
	KP.05.08	9 Berkas Baperjakat	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Biro Umum
7.	KP.06	Administrasi Pegawai				
	KP.06.00	1 a. Surat Perintah Dinas/Surat Tugas	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Bagian Kepegawaian
	KP.06.01	2 b. Cuti Besar	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Bagian Kepegawaian
	KP.06.02	3 c. Cuti Sakit, Cuti Tahunan, Cuti Bersalin	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Bagian Kepegawaian
	KP.06.03	4 d. Cuti Alasan Penting	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Bagian Kepegawaian
	KP.06.04	5 e. Cuti Dihar Tanggungan Negara (CTLM)	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Bagian Kepegawaian
	KP.06.05	6 Dokumentasi Identitas Pegawai	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat	Biro Umum

- 20 -

NO.	KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN/ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		a Usul Penetapan Kartu b Keanggotaan Organisasi c Laporan Pajak Penghasilan Pribadi (LP2P)/ SPT Tahunan/NFPWP d Keterangan Penerimaan Pembayaran Penghasilan Pegawai (KP4)			mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	
	KP.06.06	7 Berkas Kepegawaian dan Daftar Urut Kepangkatan (DUK)	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Biro Umum
	KP.06.07	8 Berkas Pengurusan Gaji Berkala	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Bagian Kepegawaian
	KP.06.08	9 Berkas Tunjangan Kinerja dan Uang Makan	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Bagian Kepegawaian
8.	KP.07	Kesejahteraan Pegawai	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Bagian Kepegawaian
	KP.07.00	1 Berkas tentang Layanan Pemeliharaan Kesehatan Pegawai				
	KP.07.01	2 Berkas tentang Layanan Asuransi Pegawai				
	KP.07.02	3 Berkas tentang Layanan Tabungan Perumahan				
	KP.07.03	4 Berkas tentang Layanan Tabungan Pensiun				
9.	KP.08	Pemberhentian Pegawai Tanpa Hak Pensiun	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Biro Umum
10.	KP.09	Perselisihan/Sengketa Kepegawaian	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Biro Umum
11.	KP.10	Organisasi Non Kedinasan, Meliputi: Korpri, Dharma Wanita, Koperasi, dll	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Bagian Kepegawaian
12.	KP.11	Usul Pemberhentian dan Penetapan Pensiun Pegawai/	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang	Bagian

- 21 -

NO.	KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN/ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		Janda/Duda dan PNS yang Tewas			dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Kepegawaian
13.	KP.12	Berkas Pegawai	Rahasia	Eselon II	Dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan Kementerian KUKM	Biro Umum
	KP.12.00	1. Berkas Perencanaan Pegawai Negeri Sipil : a. Lamaran Yang Diterima b. Nota Penetapan NP dan Kelengkapannya c. Nota Persetujuan/Pertimbangan Kepala BKN d. SK Pengangkatan CPNS e. Hasil Pengujian Kesehatan f. SK Pengangkatan CPNS g. SK Peninjauan Masa Kerja h. SK Kenaikan Pangkat i. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas/ Menduduki Jabatan dan Surat j. SK Pengangkatan dalam atau Pemberhentian dari Jabatan k. Berita Acara Pelantikan dan Serah Terima Jabatan l. SK Perpindahan Wilayah Kerja m. SK Perpindahan Antar Instansi n. SK Cuti di Luar Tanggungan Negara (CLTH) o. Berita Acara Pemeriksaan p. SK Hukuman Jabatan/Hukuman Disiplin PNS q. SK Perhentian/Dipekerjakan/Pengawasan di luar Instansi Induk r. SK Penarikan Uang Tunjangan s. SK Pemberian Uang Tunjangan t. SK Pemberhentian sebagai PNS u. SK Pemberhentian/Pembebasan Sementara v. SK Pengangkatan/Pemberhentian sebagai Pejabat Negara w. SK Pembebasan dari Jabatan Organik karena Diangkat diangkat Sebagai Pejabat Negara x. SK Pengalihan PNS y. Surat Keterangan Pernyataan Hilang z. Surat Keterangan Kembalinya PNS yang dinyatakan hilang aa. SK Penggantian Nama ab. Surat Perbaikan Tanggal Tahun Kelahiran ac. Akta Nikah/Cerai ad. Akta Kelahiran ae. Isian Formulir PUPNS af. Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji PNS				

NO.	KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN/ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		dan Jabatan ag. Surat Permohonan Menjadi Anggota Parpol ah. Surat Keterangan Meninggal Dunia/Hilang ai. Surat Keterangan Mutasi Keluarga aj. Surat Keterangan Peningkatan Pendidikan ak. Penetapan Angka Kredit (PAK) Jabatan Fungsional al. Surat Keterangan Hasil Penelitian Khusus am. Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala an. Surat Tugas/Izin Belajar Dalam/Luar Negeri ao. Surat Izin Bepergian ke Luar Negeri ap. Surat Persetujuan dan SK Perubahan data dasar/status kedudukan hukum ar. Izazah/Sertifikat as. SK Penempatan/Penarikan Pegawai at. SK Pengangkatan pada Jabatan Kedinasan di luar Instansi Induk au. Surat Pertimbangan Status PNS av. SK Pengaktifan kembali sebagai PNS aw. Surat Pernyataan Pengunduran Diri dari Jabatan Organik karena dicalonkan sebagai Kepala/Wakil Kepala Daerah ax. SK Penghargaan dan Tanda Jasa ay. SK Pensiun				
	KP.12.01	2. Berkas Perseorangan Menteri dan Eselon I	Rahasia	Eselon II	Dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan Kementerian KUKM	Biro Umum

II. KEUANGAN (KU)

A.	KU.00	RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (RAPBN) DAN RUU APBN-P				
1	KU.00.00	Penyusunan RAPBN 1 Kebijakan Umum, Renstra, Strategi dan Prioritas a. Dokumen Rencana Strategis atas Rencana Kerja Jangka Panjang atau Rencana Kerja Lima Tahunan b. Dokumen Rencana Kerja Tahunan Kementerian 2. Dokumen Rencana Anggaran Kerja Instansi Pemerintah (RAKIP) dan Dokumen Rencana Kerja Anggaran	Biasa/terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Biro Perencanaan

NO.	KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN/ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) 3. Dokumen Rancangan Anggaran Satuan Kerja Instansi Pemerintah (Raskip)/Standar Biaya Khusus (SBK)				
2	KU.00.01	Penyempitan RAPBN kepada DPR-RI 1. Pengantar Nota Keuangan Pemerintah dan Rancangan Undang-undang APBN: a. Pidato Presiden Pengantar Nota Keuangan b. Lampiran Pidato c. Nota Keuangan d. RUU APBN 2. Risalah rapat pembahasan anggaran kementerian KUKM RI dengan kementerian keuangan, bappenas, komisi DPR RI 3. Notulen Pembahasan RUU APBN oleh Pemerintah dan DPR RI 4. Notulen Rapat Paripurna Persetujuan RUU APBN a. Tanggapan masing-masing Fraksi b. Jawaban Pemerintah atas tanggapan Fraksi-fraksi 5. Nota Jawaban DPR-RI terkait dengan Pembahasan RUU APBN dengan Komisi VI DPR RI	Biasa/terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Biro Perencanaan
3	KU.00.02	Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP)	Biasa/terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Biro Perencanaan
4	KU.00.03	Keputusan Presiden tentang Rincian APBN	Biasa/terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Biro Perencanaan
5	KU.00.04	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) dan Revisinya	Biasa/terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Biro Perencanaan
6	KU.00.05	Usulan Pemerintah Mengenai Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Perubahan	Biasa/terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Biro Perencanaan

- 24 -

NO.	KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN/ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		(RUU APEN-P)			Kementerian KUKM	
7	KU.00.06	Notulen Pembahasan RUU APEN-P oleh Pemerintah dan DPR	Biasa/terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Biro Perencanaan
8	KU.00.07	Notulen Rapat Paripurna Persetujuan RUU APEN-P: - Tanggapan masing-masing fraksi - Jawaban Pemerintah atas Tanggapan Fraksi-fraksi	Biasa/terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Biro Perencanaan
9	KU.00.08	Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (UU APEN-P)	Biasa/terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Biro Perencanaan
10	KU.00.09	Keputusan Presiden tentang Rincian APEN-P	Biasa/terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Biro Perencanaan
B	KU.01	PELAKSANAAN ANGGARAN				
1	KU.01.00	Ketentuan/Peraturan Menteri Keuangan Menyangkut Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Anggaran	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Biro Keuangan
2	KU.01.01	Dokumen Realisasi Pendapatan 1 Surat Setoran Pajak (SSP) 2 Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) atau Buku Penerimaan, Buku Setor Penerimaan Negara Dukan Pajak (PNBP) 3 Bukti Setor Sisa Anggaran Lebih atau Bukti Setor Pengembalian Belanja 4 Bukti Setor Bunga dan atau Jasa Giro Bank 5 Laporan Realisasi Pendapatan Negara dari masing-masing Satuan Kerja	Biasa/terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Biro Keuangan
3	KU.01.02	Belanja 1 Dokumen Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa termasuk dokumen-dokumen Pembayarannya:	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas	Biro Keuangan

- 25 -

NO.	KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN/ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		<ul style="list-style-type: none"> a Barang pakai habis b Barang inventaris: <ul style="list-style-type: none"> - Barang Bergerak/Barang Inventaris - Tanah dan Bangunan c Jasa d Software Komputer Catatan: yang termasuk dokumen pengadaan barang dan jasa antara lain : <ul style="list-style-type: none"> - Pengumuman Lelang - Dokumen Prakualifikasi - Dokumen Peninjauan Lapangan - Berita Acara Penjelasan Pekerjaan - Berita Acara Pelelangan - Usulan Calon Pemegang - Penetapan Pemegang - Surat Perintah Kerja (SPK) - Kontrak/Adendum Kontrak 2 Dokumen Pembayaran Keuangan: <ul style="list-style-type: none"> a Pengajuan Kebutuhan Penarikan Kas b Bukti-Bukti Tagihan dari Pihak Ketiga c Surat Permintaan Pembayaran (SPP) d Surat Perintah Membayar (SPM) e Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) 3 Dokumen Tata Usaha Anggaran yaitu: <ul style="list-style-type: none"> a Buku Kas Umum (BKU) b Buku Kas Pembantu (BKP) c Buku/Kartu Pengawasan Kredit Anggaran d Rekening Koran Bank e Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) f Daftar Rekapitulasi Keuangan (DRK) g Daftar Rekapitulasi pihak ketiga h Daftar rekapitulasi PNBP i Ijin penggunaan kas besi 4 Daftar Gaji/Tunjangan/Lembur/Honorarium 5 Kartu Gaji 6 Bukti Setor Iuran/Kontribusi Pemerintah RI kepada badan/organisasi Internasional 7 Dokumen Akuntansi Keuangan: <ul style="list-style-type: none"> a Berita Acara Pemeriksaan Kas b Kas/Registur Penutupan Kas c Arsip Data Komputer (ADK) d Berita Acara Rekonsiliasi Antara Satuan Kerja 			dan fungsi Kementerian KUKM	

NO.	KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN/ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		dan KPPN 8 Verifikasi Anggaran a Nota Hasil Verifikasi (NHV) b Jawaban Nota Hasil Verifikasi (JNHV) 9 Laporan Keuangan Tahunan terdiri dari : a Laporan Realisasi Anggaran (LRA) b Neraca c Laporan Arus Kas (LAK) d Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) e Laporan Barang Milik Negara (BMN) f Laporan Realisasi Pendapatan Negara				
C	KU.02	BANTUAN/PINJAMAN LUAR NEGERI				
1	KU.02.00	Daftar Proyek-Proyek yang akan dibiayai dari Pinjaman Luar Negeri (Blue Book)	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Biro Perencanaan
2	KU.02.01	Dokumen Kesanggupan Negara Donor untuk Membiayai (Grey book)	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Biro Perencanaan
3	KU.02.02	Dokumen <i>Memorandum of Understanding (MoU)</i> , dan Dokumen Sejenisnya	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Biro Perencanaan
4	KU.02.03	Dokumen <i>Loan Agreement</i> Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN), Legal Opinion, Perjanjian Penerusan Pinjaman dan Surat Menyurat dengan <i>Lender</i>	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Biro Perencanaan
5	KU.02.04	Alokasi dan Relokasi Penggunaan Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Biro Perencanaan
6	KU.02.05	Aplikasi Penarikan Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) berikut lampirannya: - <i>Reimbursement</i> - <i>Direct Payment/ Transfer Procedure</i>	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Biro Perencanaan

NO.	KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN/ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		- <i>Special Commitment/ L/C Opening</i> - <i>Special Account/ Inprest Fund</i> - Dokumen Pengesahan atas Penerimaan Hibah Luar Negeri - <i>Notice Of Disbursement</i>				
7	KU.02.06	Otorisasi Penarikan Dana (<i>Payment Advice</i>)	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Biro Perencanaan
8	KU.02.07	Realisasi Pencairan Dana Pinjaman/Hibah Luar negeri, yaitu : Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), SPM beserta lampirannya antara lain: SPP, Kontrak, BA, dan Data Pendukung lainnya.	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Biro Perencanaan
9	KU.02.08	Replenishment (Permintaan Penarikan Dana dari Negara Donor) meliputi antara lain : Nomor Objection Letter (NOL), Project Implementation, Notification of Contract, Withdrawal Authorization (WA), Statemen of Expenditure (SE)	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Biro Perencanaan
10	KU.02.09	<i>Staff Appraisal Report</i>	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Biro Perencanaan
11	KU.02.10	<i>Report</i> / Laporan yang terdiri dari: - <i>Progress Report</i> - <i>Monthly Report</i> - <i>Quarterly Report</i> - <i>Final Report/ Completion Report</i>	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Biro Perencanaan
12	KU.02.11	Laporan Hutang Negara : - Laporan Pembayaran Hutang Negara - Laporan Posisi Hutang Negara	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Biro Perencanaan
13	KU.02.12	Ketentuan/Peraturan yang Menyangkut Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Biro Perencanaan
D	KU.03	PENGELOLA APBN/DANA PINJAMAN/HIBAH LUAR NEGERI (PHLN)				
1	KU.03.00	Keputusan Pengguna Anggaran tentang Penetapan:	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat	Biro

- 28 -

NO.	KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN/ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		<ul style="list-style-type: none"> - Kuasa Pengguna Anggaran - Kuasa Pengguna Barang/Jasa - Pejabat Pembuat Komitmen - Pejabat Pembuat Daftar Gaji - Pejabat Penandatangan SPM - Bendahara Penerimaan/Pengeluaran - Pengelola Barang <i>termasuk berita acara serah terima jabatan</i>			mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Perencanaan
E	KU.04	SISTEM AKUNTANSI INSTANSI (SAI)				
1	KU.04.00	Manual Implementasi Sistem Akuntansi Instansi (SAI)	Biasa/terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Biro Keuangan
2	KU.04.01	Kebijakan Akuntansi	Biasa/terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Biro Keuangan
3	KU.04.02	Arsip Data Komputer dan Berita Acara Rekonsiliasi	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Biro Keuangan
4	KU.04.03	Laporan Realisasi Semesteran APBN	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Biro Keuangan
F	KU.05	PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN NEGARA				
1	KU.05.00	Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Biro Keuangan
2	KU.05.01	Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan internal	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Biro Keuangan

- 29 -

NO.	KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN/ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
3	KU.05.02	Pelaksanaan Pengawasan 1 Laporan Hasil Audit (LHA), Laporan Hasil Evaluasi (LHE), Laporan Akuntan(LA), Laporan Auditor Independen (LAI) yang memerlukan Tindak Lanjut (TL) 2 Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI), yang mengandung unsur Tindak Pidana Korupsi (TPK) dan memerlukan Tindak Lanjut (TL) 3 Laporan Hasil Audit (LHA), Laporan Hasil Evaluasi (LHE), Laporan Akuntan (LA), Laporan Auditor Independen (LAI) yang tidak memerlukan Tindak Lanjut (TL) 4 Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI), yang mengandung unsur Tindak Pidana Korupsi (TPK) dan tidak memerlukan Tindak Lanjut (TL) 5 Laporan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Temuan 6 Laporan Kegiatan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan dan Review	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Biro Keuangan
4	KU.05.03	Pelaksanaan Pemeriksaan 1 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Laporan Hasil Pemeriksaan Operasional (LHPO) yang memerlukan Tindak Lanjut (TL) 2 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Laporan Hasil Pemeriksaan Operasional (LHPO) yang tidak memerlukan Tindak Lanjut (TL)	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Biro Keuangan
5	KU.05.04	Dokumen Penyelesaian Kerugian Negara : 1 Tuntutan Perbendaharaan 2 Tuntutan Ganti Rugi	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Biro Keuangan

NO.	KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN/ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7

III. NON KEPEGAWAIAN DAN NON KEUANGAN

A	PR	PERENCANAAN				
1	PR.00 PR.00.00 PR.00.01 PR.00.02	Pokok-pokok Kebijakan dan Strategi Pembangunan 1 Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 2 Rencana Pembangunan Jangka Panjang/Master plan (RPJM) Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 3 Rencana Strategis (Renstra)	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Biro Perencanaan
2	PR.01 PR.01.00 PR.01.01 PR.01.02 PR.01.03	Program Kerja Tahunan 1 Usulan unit kerja beserta data pendukung 2 Usulan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 3 Program Kerja Tahunan Unit Kerja 4 Program Kerja Tahunan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Biro Perencanaan
3	PR.02 PR.02.00 PR.02.01	Penetapan / Kontrak Kinerja 1 Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 2 Pimpinan Unit Kerja	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Biro Perencanaan
4	PR.03 PR.03.00 PR.02.01	Laporan 1 Laporan Insidental 2 Laporan Berkala a Laporan Harian Unit Kerja b Laporan Mingguan Unit Kerja c Laporan Bulanan Unit Kerja d Laporan Triwulan Unit Kerja e Laporan Semesteran f Laporan Tahunan Unit Kerja	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Biro Perencanaan

NO.	KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN/ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	PR.03.02	g Laporan Tahunan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 3 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 1) LAKIP Unit Kerja 2) LAKIP Kementerian Koperasi dan UKM				
5	PR.04 PR.04.00 PR.04.01	Evaluasi Program 1 Evaluasi program unit kerja 2 Evaluasi program Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Biro Perencanaan
6	PR.05	Nota Kesepahaman/Memorandum of Understanding (MoU)/ Kontrak/Perjanjian Kerjasama Dalam Negeri dan Luar Negeri	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Biro Perencanaan
7	PR.06 PR.06.00 PR.06.00 PR.06.00	Monitoring dan Evaluasi Program : 1 Anggaran Unit Kerja 2 Anggaran Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 3 Kerjasama	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Biro Perencanaan
B	HK	HUKUM				
1	HK.00 HK.00.00 HK.00.01	Program Legislasi 1 Bahan/materi program legislasi nasional dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 2 Program legislasi Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Biro Hukum
2	HK.01 HK.01.00 HK.01.01 HK.01.02	Rancangan Peraturan Perundang-undangan 1 Rancangan Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah, Pengganti Undang-Undang, termasuk naskah akademik, rancangan awal sampai dengan rancangan akhir dan telah hukum sampai diundangkan 2 Rancangan Peraturan Pemerintah, termasuk naskah akademik, rancangan awal sampai dengan rancangan akhir dan telah hukum sampai diundangkan 3 Rancangan Peraturan / Keputusan / Instruksi Presiden, termasuk naskah akademik, rancangan	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Biro Hukum

- 32 -

NO.	KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN/ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		awal sampai sampai dengan rancangan akhir dan telaah hukum sampai diundangkan				
3	HK.03	Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah termasuk rancangan awal sampai dengan rancangan akhir dan telaah hukum sampai dengan ditetapkan	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Biro Hukum
4	HK.04 HK.04.00 HK.04.01	Keputusan / Ketetapan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (mulai dari rancangan awal sampai dengan rancangan akhir dan telaah hukum) 1 Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 2 Keputusan Pejabat Eselon I/II	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Biro Hukum
5	HK.05 HK.05.00 HK.05.01	Instruksi / Surat Edaran (mulai dari rancangan awal sampai dengan rancangan akhir dan telaah hukum) 1 Instruksi/Surat Edaran Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 2 Instruksi/Surat Edaran Pejabat setingkat Eselon I/II	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Biro Hukum
6	HK.06 HK.06.00 HK.06.01	Surat Perintah 1 Surat Perintah Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 2 Surat Perintah Pejabat setingkat Eselon I, II, III dan IV	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Biro Hukum
7	HK.07	Standar/Pedoman/Prosedur Kerja/Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis yang bersifat nasional/regional/institusional termasuk rancangan awal sampai dengan rancangan akhir.	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Biro Hukum
8	HK.08 HK.08.00 HK.08.00	Nota Kesepahaman/Memorandum of Understanding (MoU)/Kontrak/Perjanjian Kerjasama : 1 Luar Negeri 2 Dalam Negeri	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Biro Hukum
9	HK.09 HK.09.00	Dokumentasi Hukum 1 Eksternal Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden dan Peraturan-peraturan yang dijadikan referensi internal.	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Biro Hukum

- 33 -

NO.	KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN/ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	HK.09.00	2 Produk Peraturan Perundangan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang dijadikan referensi.				
10	HK.10	Sosialisasi/Perenyuhan/Pembinaan Hukum - Berkas yang berhubungan dengan kegiatan sosialisasi/penyuluhan/pembinaan hukum. - Laporan Hasil Pelaksanaan sosialisasi/penyuluhan/pembinaan hukum	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Biro Hukum
11	HK.11	Bantuan/ Konsultasi Hukum/Advokasi Berkas tentang pemberian bantuan/konsultasi hukum (Pidana, Perdata, Tata Usaha Negara dan Agama)	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Biro Hukum
12	HK.12 HK.12.00 HK.12.01 HK.12.02 HK.12.03	Kasus/Sengketa Hukum 1 Pidana Berkas tentang kasus/sengketa pidana, baik kejahatan maupun pelanggaran : a proses verbal mulai dari penyelidikan, penyidikan sampai dengan vonis b berkas pembelaan dan bantuan hukum c telaah hukum dan opini hukum 2 Perdata Berkas tentang kasus/sengketa perdata : - proses verbal mulai dari penyelidikan, penyidikan sampai dengan vonis - berkas pembelaan dan bantuan hukum - telaah hukum dan opini hukum 3 Tata Usaha Negara Berkas tentang kasus/sengketa tata usaha negara : a proses verbal mulai dari penyelidikan, penyidikan sampai dengan vonis b berkas pembelaan dan bantuan hukum c telaah hukum dan opini hukum 4 Arbitrase Berkas tentang kasus/sengketa arbitrase : a proses verbal mulai dari penyelidikan, penyidikan sampai dengan vonis b berkas pembelaan dan bantuan hukum c telaah hukum dan opini hukum	Rahasia	Eselon II	Dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan Kementerian KUKM	Biro Hukum

NO.	KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN/ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	HK.12.04	5 Hak Atas Kekayaan Intelektual a Hak Cipta b Hak Paten				
13	HK.13	Perijinan Berkas perijinan sejak permohonan sampai dengan diterbitkannya surat ijin.	Rahasia	Eselon II	Dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan Kementerian KUKM	Biro Hukum
C OT ORGANISASI DAN KETATALAKSANAAN						
1 OT.00 ORGANISASI						
1	OT.00.00	Struktur Organisasi Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah - Pembentukan - Perubahan - Pembubaran	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Biro Umum
2	OT.00.01	Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Bagian Orta
3	OT.00.02	Evaluasi Kelembagaan	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Biro Umum
4	OT.00.03	Standar kompetensi jabatan struktural dan fungsional	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Biro Umum
5	OT.00.04	Analisa Jabatan dan Beban Kerja Struktural/Fungsional Tertentu/Fungsional Umum	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Biro Umum
2 OT.01 KETATALAKSANAAN						
1	OT.01.00	1 Ketatalaksanaan a Standar Operasional Prosedur (SOP)/Prosedur Tetap (Protap) b Mekanisme Kerja/Tata Hubungan Kerja	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Biro Umum
2	OT.01.01	2 Internalisasi Reformasi Birokrasi	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Biro Umum

NO.	KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN/ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
D TU KETATAUSAHAAN						
1	TU.00	Administrasi Persuratan a. Buku Agenda b. Lembar Pengantar / Buku Espedisi c. Formulir/Catatan permintaan dan layanan penggandaan dokumen/arsip	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Bagian Tata Usaha
2	TU.01	Penyimpanan dan Pemeliharaan Arsip a. Daftar arsip b. Pemeliharaan arsip dan ruang penyimpanan (seperti kegiatan fumigasi) c. Daftar pencarian arsip d. Daftar arsip informasi publik e. Daftar arsip vital/asset	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Bagian Tata Usaha
3	TU.02	Layanan Arsip (peminjaman, penggunaan arsip)	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Bagian Tata Usaha
4	TU.03	Perseujuan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Bagian Tata Usaha
5	TU.04	Penyusutan Arsip TU.04.00 1 Peminjaman Arsip Inaktif a Berita Acara Peminjaman b Daftar Arsip yang dipindahkan TU.04.01 2 Pemusnahan arsip yang tidak bernilai guna a Berita Acara Pemusnahan b Daftar Arsip yang dimusnahkan c Rekomendasi/pertimbangan/pemusnahan arsip dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah d Surat Keputusan Pemusnahan TU.04.02 3 Penyerahan Arsip Statis a Berita Acara Serah Terima Arsip b Daftar Arsip yang diserahkan	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Biro Umum

- 36 -

NO.	KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN/ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
6	TU.05 TU.05.00 TU.05.01	Pembinaan Kearsipan : 1 Apresiasi/ sosialisasi/ penyuluhan 2 Bimbingan Teknis	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Bagian Tata Usaha
7	TU.06 TU.06.00 TU.06.01	Perjalanan Dinas : 1 Dalam Negeri 2 Luar Negeri	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Bagian Tata Usaha
8	TU.07 TU.07.00 TU.07.01	Risalah / Notulen Rapat 1 Rapat pimpinan 2 Rapat staf	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Bagian Tata Usaha
E	RT	KERUMAHTANGGAN				
1	RT.00 RT.00.00 RT.06.01	Rencana Kebutuhan Barang 1 Unit Kerja 2 Lembaga (Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah)	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Bagian Rumah Tangga
2	RT.01 RT.01.00 RT.01.00	Pengadaan Barang 1 Telaahan pelaksanaan lelang/pemilikan/penunjukan langsung 2 Dokumen lelang a Barang inventaris kantor/ barang bergerak, (penawaran pengumuman pemenang, daftar rekanan, sampai dengan kontrak dan serah terima barang) b Barang investasi (penawaran, pengumuman pemenang, daftar rekanan, sampai dengan kontrak dan serah terima barang)	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Biro Umum
3	RT.02 RT.02.00 RT.02.01	Penyimpanan Barang dan Distribusi 1 Penyimpanan inventaris kekayaan negara a Surat bukti barang masuk b Surat bukti pengeluaran barang 2 Pendistribusian a Surat jalan b Tanda terima	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Biro Umum

- 37 -

NO.	KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN/ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
4	RT.03 RT.03.00 RT.03.00 RT.03.01 RT.03.02 RT.03.03	Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) 1 SIMAK BMN 2 Pembukuan BMN a Daftar barang kuasa/ pengguna b Kartu Identitas Barang 3 Daftar Barang Ruangan 4 Inventarisasi BMN a Keputusan pembentukan tim b Rencana pelaksanaan inventarisasi c Kertas Kerja inventarisasi d Berita Acara Inventarisasi e Daftar Inventarisasi/Buku Barang/Daftar Barang Lainnya f Laporan Hasil Inventarisasi 5 Laporan BMN a Laporan Kondisi Barang b Laporan Barang Kuasa Pengguna c Berita Acara Rekonsiliasi Eksternal dan Internal d Laporan Persediaan Habis Pakai e Laporan Persediaan Tidak Habis Pakai f Laporan Pengelolaan Barang Milik Negara	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Biro Umum
5	RT.04	Dokumen Kepemilikan Asset/ Kekayaan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Sertifikat Tanah, IMB, BPKB, STNK, Blueprint dll)	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Biro Umum
6	RT.05	Penghapusan Barang Milik Negara (BMN) Pelaksanaan penghapusan BMN - Keputusan pembentukan tim - Berita Acara Penghapusan BMN - Daftar Barang yang dihapus - Laporan hasil pelaksanaan penghapusan BMN termasuk didalamnya proses lelang penghapusan.	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Biro Umum
7	RT.06	Telekomunikasi : Administrasi penggunaan/langganan peralatan telekomunikasi meliputi : Telepon, faksimili, radio, teleks, TV kabel, dan internet Administrasi penggunaan/langganan peralatan	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Biro Umum

NO.	KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN/ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		telekomunikasi				
8	RT.07	Administrasi penggunaan fasilitas kantor meliputi : Permintaan dan penggunaan ruang, gedung, kendaraan, wisma, rumah dinas, dan fasilitas kantor lainnya	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Bagian Rumah Tangga
9	RT.08	Administrasi penyediaan konsumsi dan akomodasi	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Bagian Rumah Tangga
10	RT.09	Pengurusan kendaraan dinas - Pengurusan surat-surat kendaraan dinas - Pemeliharaan dan perbaikan - Pengurusan kehilangan dan masalah kendaraan	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Bagian Rumah Tangga
11	RT.10 RT.10.00 RT.10.01 RT.10.02 RT.10.03 RT.10.04	Pemeliharaan Gedung dan Taman 1 Pemananan (landscaping) 2 Penghijauan 3 Perbaikan gedung 4 Perbaikan rumah dinas/wisma 5 Kebersihan gedung dan taman	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Bagian Rumah Tangga
12	RT.11 RT.11.00 RT.11.01	Pengelolaan Jaringan Listrik, Air, Telepon dan Komputer 1 Perbaikan / pemeliharaan 2 Pemasangan	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Biro Umum
13	RT.12 RT.12.00 RT.12.01	Ketertiban dan Keamanan 1 Pengamanan, penjagaan dan pengawalan terhadap pejabat, kantor dan rumah dinas : a Daftar nama satuan pengamanan b Daftar jaga / daftar piket c Catatan gangguan/pelanggaran/kejadian d Surat ijin keluar masuk orang atau barang 2 Laporan ketertiban dan keamanan a Kehilangan b Kerusakan c Kecelakaan d Gangguan	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Bagian Rumah Tangga
14	RT.13	Administrasi Pengelolaan Parkir	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang	Bagian

NO.	KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN/ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
					dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Rumah Tangga
15	RT.14	Administrasi Pelaksanaan Dinas Pegawai, Satpam, Petugas kebersihan dan pegawai lainnya.	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Bagian Rumah Tangga
F	HM	HUBUNGAN MASYARAKAT				
1	HM.00 HM.00.00 HM.00.01 HM.00.02 HM.00.03 HM.00.04	Keprotokolan 1 Penyelenggaraan acara kedinasan (upacara, pelantikan, peresmian, dan jamuan termasuk acara peringatan hari-hari besar) 2 Buku tamu 3 Agenda kegiatan pimpinan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 4 Kunjungan dinas dalam dan luar negeri a Kunjungan dinas Menteri b Kunjungan dinas pejabat Eselon I c Kunjungan dinas pejabat lain/pegawai 5 Daftar nama/alamat kantor/pejabat	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Biro Umum
2	HM.01 HM.01.00 HM.01.01 HM.01.02	Dokumentasi/liputan kegiatan dinas pimpinan, acara kedinasan dan peristiwa-peristiwa bidang masing-masing, dalam berbagai media: Kertas/foto/video/rekam an suara/multi media 1 Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 2 Eselon I 3 Pejabat lain/pegawai	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Biro Umum
3	HM.02 HM.02.00 HM.02.01 HM.02.02	Pengumpulan, pengolahan dan penyajian informasi kelembagaan: 1 Kliping koran 2 Brosur/leaflet/poster/plakat 3 Pengumuman/pemberitahuan	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Bagian Humas
4	HM.03 HM.03.00 HM.03.01 HM.03.02 HM.03.03	Hubungan antar Lembaga Negara dan Badan Pemerintah/Instansi 1 Hubungan antar lembaga pemerintah 2 Hubungan dengan organisasi sosial/LSM 3 Hubungan dengan perusahaan 4 Hubungan dengan perguruan tinggi/sekolah	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Biro Umum

- 40 -

NO.	KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN/ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	HM.03.04 HM.03.05 HM.03.06	5 Hubungan dengan perguruan tinggi/sekolah, termasuk magang pendidikan sistem ganda (PSG)/praktek kerja lapangan (PKL) 6 Forum kehumasan (Bakohumas/Perhumas) 7 Hubungan dengan media massa: a Siran pers/konferensi pers/press b Kunjungan wartawan/peliputan				
5	HM.04 HM.04.00 HM.04.01 HM.04.02 HM.04.03 HM.04.04 HM.04.05	Dokumen persidangan dan Rapat (Bahan Sidkab, Rapat Terbatas, Rakor Tingkat Badan, RDP DPR/DPD RI, Pidato Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 1 Bahan Sidang Kabinet 2 RDP DPR/DPD RI 3 Rakor Tingkat badan termasuk hasil rumusan dan transkrip 4 Bahan Rapat Terbatas Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 5 Pidato Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 6 Bahan Pidato kenegaraan Presiden bidang Koperasi dan UKM	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Biro Umum
6	HM.05	Penerbitan Majalah, Buletin, Koran dan Jurnal	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Bagian Humas
7	HM.06	Publikasi Melalui Media Cetak Maupun Elektronik	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Bagian Humas
8	HM.07	Pameran/Sayembara/Lomba/Festival/Pembuatan Spandu dan Iklan	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Bagian Humas
9	HM.08	Penghargaan/Tanda kenang-kenangan Administrasi pemberian penghargaan/tanda kenang-kenangan kepada masyarakat yang memiliki jasa prestasi besar	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Bagian Humas
10	HM.09	Ucapan terima kasih, ucapan selamat, bela sungkawa,	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang	Bagian

- 41 -

NO.	KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN/ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		permohonan maaf dll			dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Humas
11	HM.10 HM.10.00 HM.10.01 HM.10.02 HM.10.03	Layanan Kehumasan 1 Layanan Diorama 2 Layanan Sader Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 3 Layanan Informasi Publik 4 Layanan Wibesite	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Bagian Humas
G	PU	KEPUSTAKAAN				
1	PU.00 PU.00.00 PU.00.01	Penyimpanan Deposit Bahan Pustaka 1 Bukti penerimaan koleksi bahan pustaka deposit 2 Administrasi pengolahan deposit bahan pustaka	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Biro Umum
2	PU.01 PU.01.00 PU.01.01 PU.01.02 PU.01.03 PU.01.04 PU.01.05 PU.01.06 PU.01.07 PU.01.08 PU.01.09	Pengadaan dan pengolahan bahan pustaka 1 Buku induk koleksi 2 Daftar buku terseleksi 3 Daftar buku dalam pemesanan 4 Daftar buku dalam permintaan 5 Daftar penerimaan bahan pustaka hasil pembelian, hadiah deposit, hibah 6 Daftar pengiriman bahan pustaka surplus 7 Lembar kerja pengolahan BP (buram, pengkatalogan) 8 Sheet list / Jjajaran kartu utama (master list) 9 Daftar tambahan buku (assesion list) 10 Daftar / jjajaran kendali (subyek dan pengarang)	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Biro Umum
3	PU.02 PU.02.00 PU.02.01	Layanan jasa perpustakaan dan informasi 1 Data dan statistik anggota, pengunjung dan peminjaman bahan pustaka 2 Pertanyaan rujukan dan jawaban	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Bagian Humas
4	PU.03 PU.03.00 PU.03.01	Preservasi bahan pustaka 1 Survei kondisi bahan pustaka 2 Reprografi bahan pustaka	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Bagian Humas
H	TI	TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI				

NO.	KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN/ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
1	TI.00	Rencana Strategis / master plan Pembangunan Sistem Informasi Manajemen (SIM)	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Biro Perencanaan
2	TI.01 TI.01.00 TI.01.01 TI.01.02	Dokumentasi Arsitektur dan Implementasi: 1 Sistem informasi 2 Sistem aplikasi 3 Infrastruktur	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Biro Perencanaan
3	TI.02	Perekaman dan Pemutakhiran Data : - Formulir isian - Daftar petugas perekaman - Jadwal pelaksanaan - Laporan hasil perekaman dan pemutakhiran data	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Biro Perencanaan
4	TI.03	Migrasi Sistem Aplikasi dan Data - Perencanaan migrasi - Pelaksanaan migrasi - Berita Acara kegiatan migrasi - Daftar sistem aplikasi dan data yang dimigrasi - Laporan hasil migrasi	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Biro Perencanaan
5	TI.04	Dokumen hosting - Formulir permintaan hosting - Laporan hasil uji kelayakan - Laporan pelaksanaan hosting	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Bagian Data
6	TI.05	Layanan Back-up data digital	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Biro Perencanaan
7	TI.06	Database	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Biro Perencanaan
8	TI.07	Design Informasi dan Komunikasi	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Biro Perencanaan

NO.	KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN/ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
9	TI.08	Evaluasi Sistem dan Media	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Biro Perencanaan
1	IN	PENGAWASAN / INSPEKTORAT				
1	IN.00 IN.00.00 IN.00.01 IN.00.02 IN.00.03	Rencana Pengawasan : 1 Rencana Strategis Pengawasan 2 Rencana Kerja Tahunan 3 Rencana dan Penetapan Kinerja Tahunan 4 Rakor Pengawasan Tingkat Nasional	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Inspektorat
2	IN.01 IN.01.00 IN.01.01 IN.01.02 IN.01.03 IN.01.04 IN.01.05	Pelaksanaan Pengawasan : 1 a Laporan Hasil Audit (LHA), Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Laporan Hasil Pemeriksaan Operasional (LHPO), Laporan Hasil Evaluasi (LHE), Laporan Akuntan (LA), Laporan Auditor Independen (LAI) yang memerlukan tindak lanjut (TL) b Laporan hasil audit investigasi (LHAI) yang mengandung unsur tindak pidana korupsi (TPK) dan memerlukan tindak lanjut 2 a Laporan Hasil Audit (LHA), Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Laporan Hasil Pemeriksaan Operasional (LHPO), Laporan Hasil Evaluasi (LHE), Laporan Akuntan (LA), Laporan Auditor Independen (LAI) yang tidak memerlukan tindak lanjut b Laporan hasil audit investigasi (LHAI) yang mengandung unsur tindak pidana korupsi (TPK) dan tidak memerlukan tindak lanjut 3 Laporan perkembangan penanganan surat pengaduan masyarakat 4 Laporan pemutakhiran data tindak lanjut temuan 5 Laporan perkembangan Barang Milik Negara (BMN) 6 Laporan kegiatan pendampingan penyusunan laporan keuangan dan review Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Inspektorat

- 44 -

NO.	KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN/ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	IN.01.06	7 Good Corporate Governance (GCG)				

IV. SUBSTANTIF

A.	KB	KEBIJAKAN				
1.	KB.00	Kebijakan dalam Kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Pembiayaan, Pengelolaan Dana Bergulir, Produksi, Pemasaran dan Jaringan Usaha, Layanan Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Restrukturisasi Usaha Pengawasan, Ekonomi Makro, Produktivitas dan Daya Saing, Hubungan Antar Lembaga, MOU (Perjanjian Kerja Sama), Gerakan Kewirausahaan Nasional, Penetapan Bantuan: - Pengkajian dan pengusulan kebijakan - Penyusunan kebijakan - Perumusan kebijakan - Pemberian masukan dan dukungan kebijakan - Penetapan dalam bentuk NSPK	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Masing-masing Deputi
2.	KB.01	Monitoring dan Evaluasi	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Masing-masing Deputi

- 45 -

NO.	KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN/ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
B	KL	KELEMBAGAAN KOPERASI DAN UKM				
1	KL.00 KL.00.01 KL.00.02 KL.00.03 KL.00.04 KL.00.05 KL.00.06	Organisasi dan Badan Hukum Koperasi 1 Organisasi Koperasi dan UKM a Organisasi Koperasi b Organisasi UKM 2 Badan Hukum Koperasi a Penatausahaan Badan Hukum Koperasi b Evaluasi Badan Hukum Koperasi 3 Penelaahan Kasus Hukum a Kasus Hukum Koperasi b Kasus Hukum UKM 4 Pendirian Koperasi a Pendaftaran Pendirian Koperasi b Pengesahan Koperasi 5 Perubahan Anggaran Dasar Koperasi a Pendaftaran Perubahan anggaran Dasar Koperasi b Persetujuan dan Pencatatan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi 6 Pembubaran Koperasi a Pembubaran b Penyelesaian	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Asdep Organisasi dan Badan Hukum
2	KL.01 KL.01.01 KL.01.02 KL.01.03 KL.01.04	Peraturan Perundang-Undangan 1 Penyusunan dan Evaluasi Perundang-Undangan Koperasi a Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Koperasi b Evaluasi Perundang-Undangan Koperasi 2 Penyusunan dan Evaluasi Perundang-Undangan UKM a Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan UKM b Evaluasi Perundang-Undangan UKM 3 Dokumentasi Peraturan Perundang-Undangan Koperasi a Produk Peraturan Perundang-Undangan Pusat b Peraturan Daerah 4 Penerapan Peraturan Perundang-Undangan a Penerapan Peraturan Perundang-Undangan Koperasi b Penerapan Peraturan Perundang-Undangan	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Asdep Perundang-undangan

- 46 -

NO.	KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN/ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		UMKM				
	KL.01.05	5 Penelaah Peraturan Perundang-Undangan a Penelaah Peraturan Perundang-Undangan Koperasi b Penelaah Peraturan Perundang-Undangan UMKM				
	KL.01.06	6 Dokumentasi Peraturan Perundang-Undangan UKM a Produk Peraturan Perundang-Undangan Pusat b Peraturan Daerah				
3	KL.02	Tata laksana Koperasi dan UKM	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Asdep Tata laksana KUKM
	KL.02.00	1 Tata laksana Koperasi a Tata laksana Koperasi Primer b Tata laksana Koperasi Sekunder				
	KL.02.01	2 Tata laksana Usaha Kecil dan Menengah a Tata laksana Usaha Kecil b Tata laksana Usaha Menengah				
	KL.02.02	3 Klasifikasi Koperasi dan UKM a Klasifikasi Koperasi b Klasifikasi UKM				
	KL.02.03	4 Tata Kelola Koperasi a Pengembangan Tata Kelola Koperasi b Pemantauan dan Evaluasi Tata Kelola Koperasi				
	KL.02.04	5 Tata Kelola UMKM a Pengembangan Tata Kelola UMKM b Pemantauan dan Evaluasi Tata Kelola UMKM				
	KL.02.05	6 Akuntabilitas Usaha a Sistem Akuntabilitas Usaha b Penilaian Kerja				
4	KL.03	Keanggotaan Koperasi	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Asdep Keanggotaan
	KL.03.00	1 Partisipasi Usaha dan Permodalan a Partisipasi Usaha b Partisipasi Permodalan				
	KL.03.01	2 Partisipasi Pengawasan a Rapat Anggota b Pengawasan				
	KL.03.02	3 Pengembangan Anggota a Kaderisasi b Penyuluhan				
	KL.03.03	4 Partisipasi Modal dan Usaha a Partisipasi Modal b Partisipasi Usaha				
	KL.03.04	5 Partisipasi Pengawasan Anggota				

- 47 -

NO.	KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN/ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		a Pelaksanaan Program Kerja b Pelaksanaan Pertanggungjawaban				
	KL.03.05	6 Promosi Anggota a Pengembangan Promosi Ekonomi Anggota b Pengembangan Promosi Non Ekonomi Anggota				
5	KL.04	Pengendalian dan Akuntabilitas	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Asdep Pengendalian dan Akuntabilitas
	KL.04.00	1 Pengendalian a Pengendalian Intern b Tindak Lanjut Hasil Pengendalian				
	KL.04.01	2 Bidang Akuntabilitas dan Akuntansi a Akuntabilitas b Akuntansi dan Audit				
	KL.04.02	3 Monitoring dan Evaluasi a Monitoring b Evaluasi				
6	KL.05	Penyuluhan	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Asdep Penyuluhan
	KL.05.00	1 Pengembangan Penyuluhan a Teknik Penyuluhan b Profesi Penyuluh				
	KL.05.01	2 Sosialisasi Penyuluhan a Penyiapan Bahan Sosialisasi b Pelaksanaan Sosialisasi				
	KL.05.02	3 Kaderisasi Penyuluhan a Potensi Kader b Pembinaan Kader				
C	PB	PEMBIAYAAN				
1	PB.00	Program Pendanaan	Terbatas	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Asdep Program Pendanaan
	PB.00.00	1 Program Pendanaan Jangka Pendek a Program Pendanaan Koperasi Jangka Pendek b Program Pendanaan UKM Jangka Pendek				
	PB.00.01	2 Program Pendanaan Jangka Menengah dan Panjang a Program Pendanaan Koperasi Jangka Menengah dan Panjang b Program Pendanaan UKM Jangka Menengah dan Panjang				
	PB.00.02	3 Program Pendanaan Usaha Mikro dan Dana Bergulir a Program Pendanaan Usaha Mikro b Program Pendanaan Dana Bergulir				

- 48 -

NO.	KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN/ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
2	PE.01	Pengembangan dan Pengendalian Simpan Pinjam	Terbatas	Eslon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Asdep PPSP
	PE.01.00	1 Pengembangan dan Pengendalian KSP a Pengembangan Kelembagaan KSP b Pengendalian Kelembagaan KSP				
	PE.01.01	2 Pengembangan dan Pengendalian USP Koperasi a Pengembangan USP Koperasi b Pengendalian USP Koperasi				
	PE.01.02	3 Pengembangan dan Pengendalian USP-LKM a Pengembangan USP-LKM b Pengendalian USP-LKM				
	PE.01.03	4 Literasi dan Penumbuhan KSP dan USP a Literasi KSP dan USP b Penumbuhan KSP dan USP				
	PE.01.04	5 Pemberdayaan dan Pengembangan KSP dan USP a Pengembangan KSP dan USP b Pemberdayaan KSP dan USP				
	PE.01.05	6 Peningkatan Akses Pembiayaan a Kerjasama antar Lembaga Keuangan b Advokasi Akses Pembiayaan KSP dan USP				
3	PE.02	Urusan Permodalan	Terbatas	Eslon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Asdep Permodalan
	PE.02.00	1 Pengembangan Permodalan Sendiri a Permodalan Sendiri Koperasi b Permodalan Sendiri UKM				
	PE.02.01	2 Pengembangan Permodalan Luar a Permodalan Bank b Permodalan Non Bank				
	PE.02.02	3 Pengembangan Kredit Program a Kredit Program Bank b Kredit Program Non Bank				
	PE.02.03	4 Pengembangan Dana Cadangan dan Hibah a Pengembangan Dana Cadangan b Pengembangan Dana Hibah				
	PE.02.04	5 Kredit Program a Kredit Program Koperasi b Kredit Program UMKM				
4	PE.03	Asuransi dan Jasa Keuangan	Biasa/Terbuka	Eslon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Asdep Asuransi dan Jasa Keuangan
	PE.03.00	1 Asuransi a Asuransi Koperasi b Asuransi UKM				
	PE.03.01	2 Perpajakan a Perpajakan Koperasi				

- 49 -

NO.	KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN/ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		b Perpajakan UKM				
	PE.03.02	3 Jasa Keuangan dan Kredit Komersial a Jasa Keuangan dan Kredit Komersial Bank b Jasa Keuangan dan Kredit Non Komersial Bank				
	PE.03.03	4 Asuransi a Asuransi Umum b Asuransi Kredit				
5	PE.04	Pembiayaan dan Penjaminan Kredit	Terbatas	Eslon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Asdep Pembiayaan dan Penjaminan Kredit
	PE.04.00	1 Lembaga Pembiayaan a Modal Ventura b Sewa Guna Usaha dan Anjak Pinang				
	PE.04.01	2 Penjaminan Kredit a Penjaminan b Asuransi Kredit c Penjaminan Simpanan Koperasi				
	PE.04.02	3 Pasar Modal a Obligasi b Modal Penyertaan c Surat Hutang d Investasi Dana				
6	PE.05	Pembiayaan Syariah	Biasa/Terbuka	Eslon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Asdep Pembiayaan Syariah
	PE.05.00	1 Literasi dan Penumbuhan KSPPS dan USPPS a Literasi Keuangan Syariah b Penumbuhan KSPPS dan USPPS				
	PE.05.01	2 Pemberdayaan dan Pengembangan KSPPS dan USPPS a Pemberdayaan dan Pengembangan Pembiayaan KSPPS dan USPPS b Fasilitas Pengembangan dan Pendayagunaan ZISWAF				
	PE.05.02	3 Peningkatan Akses Pembiayaan Syariah a Kerjs sama antar Lembaga Keuangan Syariah b Advokasi Akses Pembiayaan KSPPS dan USPPS				
7	PE.06	Pembiayaan Non Bank	Terbatas	Eslon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Asdep Pembiayaan Non Bank
	PE.06.00	1 Lembaga Pembiayaan a Modal Ventura, Sewa Guna Usaha dan Anjak Pinang b Gadai dan Fidusia				
	PE.06.01	2 Dana Bergulir a Pengembangan Dana Bergulir b Kerjasama dan Pendayagunaan Dana Bergulir				

NO.	KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN/ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	PE.06.02	3 Perpajakan a Perpajakan Koperasi dan UKM b Perpajakan Usaha Mikro				
D	DE	DANA BERGULIR				
	DE.00	PENGELOLA DANA BERGULIR KUKM				Mempunyai KKAAD sendiri
E	PD	PRODUKSI				
1	PD.00	Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	Biasa/Terbuka	Eslon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Asdep PTFH
	PD.00.00	1 Tanaman Pangan a Padi b Palawija				
	PD.00.01	2 Hortikultura a Buah-Buahan dan Tanaman Obat b Tanaman Hias dan Sayur				
	PD.00.02	3 Sarana a Sarana Produksi b Sarana Pengolahan				
2	PD.01	Kehutanan dan Perkebunan	Biasa/Terbuka	Eslon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Asdep Kehutanan dan Perkebunan
	PD.01.00	1 Kehutanan a Hutan Produksi b Hutan Kemasyarakatan				
	PD.01.01	2 Perkebunan a Tanaman Semusim dan Rempah-Rempah b Tanaman Keras				
	PD.01.02	3 Sarana a Sarana Produksi b Sarana Pengolahan				
3	PD.02	Perikanan dan Peternakan	Biasa/Terbuka	Eslon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Asdep Perikanan dan Peternakan
	PD.02.00	1 Perikanan a Perikanan Tangkap b Perikanan Budidaya				
	PD.02.01	2 Peternakan a Ternak Besar b Ternak Kecil				

NO.	KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN/ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	PD.02.02	3 Sarana a Sarana Produksi b Sarana Pengolahan				
4	PD.03	Industri Kerajinan dan Pertambangan	Biasa/Terbuka	Eslon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Asdep Industri Kerajinan dan Pertambangan
	PD.03.00	1 Industri a Sandang, Logam dan Elektronika b Pangan, Kimia dan Aneka				
	PD.03.01	2 Kerajinan a Logam b Non Logam				
	PD.03.02	3 Pertambangan dan Migas a Pertambangan Umum b Pertambangan Migas				
5	PD.04	Ketenaga listrik dan Aneka Usaha	Biasa/Terbuka	Eslon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Asdep Ketenagalistrikan dan Aneka Usaha
	PD.04.00	1 Ketenaga listrik dan Konstruksi a Listrik b Konstruksi				
	PD.04.01	2 Aneka Usaha a Jasa Umum b Angkutan				
	PD.04.02	3 Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi a Pariwisata b Pos dan Telekomunikasi				
F	PS	PEMASARAN				
1	PS.00	Perdagangan Dalam Hegeri	Biasa/Terbuka	Eslon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Asdep Perdagangan Dalam Hegeri
	PS.00.00	1 Pengadaan a Pengadaan Sektor Formal b Pengadaan Sektor Informal				
	PS.00.01	2 Ditribusi a Ditribusi Sektor Formal b Ditribusi Sektor Informal				
	PS.00.02	3 Pengembangan a Pengembangan Sektor Formal b Pengembangan Sektor Informal				
2	PS.01	Ekspor dan Impor	Terbatas	Eslon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Asdep Ekspor dan Impor
	PS.01.00	1 Ekspor a Ekspor Koperasi b Ekspor UKM				

- 52 -

NO.	KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN/ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	PS.01.01 PS.01.02	2 Impor a Impor Koperasi b Impor UKM 3 Hubungan Perdagangan Internasional a Hubungan Perdagangan Multilateral dan Regional b Hubungan Perdagangan Bilateral				
3	PS.02 PS.02.00 PS.02.01 PS.02.02	Sarana dan Prasarana Pemasaran 1 Sarana a Pengembangan Pasar Tradisional b Pengembangan Sentra Pemasaran 2 Prasarana a Lembaga Perantara b Fasilitas HAKI 3 Pengembangan Potensi Pemasaran a Pengembangan Potensi Pemasaran Koperasi b Pengembangan Potensi Pemasaran UKM	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Asdep Sarpras Pemasaran
4	PS.03 PS.03.00 PS.03.01 PS.03.02	Kemitraan dan Jaringan Usaha 1 Kemitraan a Kemitraan Koperasi b Kemitraan UKM 2 Jaringan Usaha a Jaringan Usaha Koperasi b Jaringan Usaha UKM 3 Pengembangan Kerja Sama Kelembagaan a Pengembangan Kerja Sama Kelembagaan Koperasi b Pengembangan Kerja Sama Kelembagaan UKM	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Asdep Kemitraan dan Jaringan Usaha
5	PS.04 PS.04.00 PS.04.01 PS.04.02	Informasi dan Publikasi Bisnis 1 Pengumpulan Informasi a Pengumpulan Informasi Koperasi b Pengumpulan Informasi UKM 2 Pengolahan Informasi a Pengolahan Informasi Koperasi b Pengolahan Informasi UKM 3 Publikasi dan Promosi a Publikasi dan Promosi Koperasi b Publikasi dan Promosi UKM	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Asdep Informasi dan Publikasi Bisnis
G	LP	LAYANAN PEMASARAN				

- 53 -

NO.	KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN/ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	LP.00	LAYANAN PEMASARAN KUKM				Mempunyai KIAAD sendiri
H	SM	SUMBER DAYA MANUSIA				
1	SM.00 SM.00.00 SM.00.01 SM.00.02	Pengembangan Kewirausahaan 1 Lembaga Kewirausahaan a Pengembangan Jaringan Kewirausahaan b Peningkatan Sumber Daya Kewirausahaan 2 Penumbuhan Kewirausahaan a Peningkatan Kemampuan Kewirausahaan b Evaluasi Kewirausahaan c Fasilitas Kewirausahaan d Pemasyarakatan Kewirausahaan e Penguat Kewirausahaan 3 Sosialisasi Kewirausahaan a Perangkat Lunak b Promosi Kewirausahaan	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Asdep Pengembangan Kewirausahaan
2	SM.01 SM.01.00 SM.01.01 SM.01.02 SM.01.03 SM.01.04 SM.01.05	Kebijakan Pendidikan Koperasi dan UKM 1 Diklat Formal dan Informal a Diklat Formal b Diklat Informal 2 Diklat Non Formal a Perangkat Lunak b Sarana dan Prasarana Diklat 3 Kerjasama Lembaga Diklat a Hubungan Lembaga Diklat Pemerintah b Hubungan Lembaga Diklat Non Pemerintah 4 Peningkatan Kualitas Fasilitator dan Pengelola Koperasi a Peningkatan Kualitas Fasilitator Koperasi b Peningkatan Kualitas Pengelola Koperasi 5 Peningkatan Kualitas Lembaga Diklat Perkoperasian a Peningkatan Kualitas Media Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian b Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian 6 Pengembangan Kurikulum dan Modul Diklat a Pengembangan Kurikulum Diklat	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Asdep Kebijakan Pendidikan KUKM

NO.	KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN/ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		b Pengembangan Materi Diklat				
3	SM.02 SM.02.00 SM.02.01 SM.02.02 SM.02.03 SM.02.04 SM.02.05	Peran Serta Masyarakat 1 Peningkatan Dukungan Media Massa terhadap Koperasi dan UKM a Peningkatan Dukungan Media Massa terhadap Koperasi b Peningkatan dukungan Media Massa terhadap UKM 2 Peningkatan Dukungan LSM Terhadap Koperasi dan UKM a Peningkatan Dukungan LSM Terhadap Koperasi b Peningkatan Dukungan LSM Terhadap UKM 3 Peningkatan Dukungan Organisasi Profesi a Dukungan Organisasi Profesi terhadap Koperasi b Dukungan Organisasi Profesi terhadap UKM 4 Pengembangan Peran Organisasi Profesi a Peningkatan Dukungan Organisasi Profesi b Perkuatan Lembaga Pendidikan dan Latihan 5 Pengembangan Peran Organisasi Kemasyarakatan a Dukungan Organisasi Kemasyarakatan Koperasi b Dukungan Organisasi Kemasyarakatan UMKM 6 Pengembangan Peran Organisasi Kependidikan a Dukungan Pelatihan Keterampilan Teknis b Dukungan Pemagangan	Biasa/Terbuka	Eslon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Asdep Peran Serta Masyarakat
4	SM.03 SM.03.00 SM.03.01 SM.03.02	Monitoring dan Evaluasi Diklat Koperasi dan UKM 1 Monitoring dan Evaluasi Diklat Koperasi dan UKM a Monitoring dan Evaluasi Diklat Koperasi b Monitoring dan Evaluasi Diklat UKM 2 Monitoring dan Evaluasi Diklat Formal dan Informal a Monitoring dan Evaluasi Diklat Formal b Monitoring dan Evaluasi Diklat Informal 3 Monitoring dan Evaluasi Lembaga Diklat a Monitoring dan Evaluasi Lembaga Diklat Pemerintah b Monitoring dan Evaluasi Lembaga Diklat Non Pemerintah	Biasa/Terbuka	Eslon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Asdep Monev Diklat KUKM
5	SM.04 SM.04.00 SM.04.01	Standarisasi dan Sertifikasi SDM KUMKM 1 Pengembangan Standarisasi SDM KUMKM a Pengembangan Standarisasi SDM Koperasi b Pengembangan Standarisasi SDM UMKM 2 Fasilitasi Sertifikasi SDM Koperasi dan UMKM	Biasa/Terbuka	Eslon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Asdep Standarisasi dan Sertifikasi SDM KUKM

NO.	KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN/ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		a Fasilitasi Sertifikasi SDM Koperasi b Fasilitasi Sertifikasi SDM UMKM				
6	SM.05 SM.05.00 SM.05.01 SM.05.02 SM.05.03 SM.05.04	Advokasi 1 Advokasi Organisasi dan Manajemen a Advokasi Organisasi b Advokasi Manajemen 2 Advokasi Kemitraan dan Teknologi a Advokasi Kemitraan b Advokasi Teknologi 3 Advokasi Peraturan Perundang-Undangan a Kajian Penerapan b Sosialisasi Perundang-Undangan 4 Advokasi SDM Koperasi dan UMKM a Advokasi SDM Koperasi b Advokasi SDM UMKM 5 Advokasi Usaha a Advokasi Usaha Koperasi b Advokasi Usaha UMKM	Terbatas	Eslon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Asdep Advokasi
7	SM.06 SM.06.00 SM.06.01 SM.06.02	Penelitian dan Pengkajian KUMKM 1 Penelitian dan Pengkajian Koperasi a Penelitian Kelembagaan Koperasi b Penelitian Usaha Koperasi 2 Penelitian dan Pengkajian UMKM a Penelitian dan Pengkajian Usaha Mikro b Penelitian dan Pengkajian Usaha Kecil dan Menengah 3 Penelitian dan Pengkajian Sumberdaya a Penelitian dan Pengkajian Sumberdaya b Pengelolaan Sumberdaya	Terbatas	Eslon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Deputi SDM
I	TB	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				
1	TB.00 TB.00.00 TB.00.01 TB.00.02	Penelitian Koperasi 1 Perencanaan dan Pengendalian a Perencanaan b Evaluasi dan Pelaporan 2 Penyelenggaraan a Kelembagaan Koperasi b Bisnis Koperasi 3 Tata Laksana Penelitian a Temu Ilmiah dan Pengembangan Metodologi	Terbatas	Eslon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Deputi SDM

- 56 -

NO.	KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN/ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		b Sarana dan Prasarana				
2	TB.01	Penelitian UKM	Terbatas	Eslon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Deputi SDM
	TB.01.00	1 Perencanaan dan Pengendalian a Perencanaan b Evaluasi dan Pelaporan				
	TB.01.01	2 Penyeleenggaraan a Kelembagaan UKM b Bisnis UKM				
	TB.01.02	3 Tata Laksana Penelitian a Temu Ilmiah dan Pengembangan Metodologi b Sarana dan Prasarana				
3	TB.02	Penelitian Sumber Daya	Biasa/Terbuka	Eslon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Deputi SDM
	TB.02.00	1 Perencanaan dan Pengendalian a Perencanaan b Evaluasi dan Pelaporan				
	TB.02.01	2 Penyeleenggaraan a Sumber Daya Manusia b Pembinaan				
	TB.02.02	3 Tata Laksana Penelitian a Temu Ilmiah dan Pengembangan Metodologi b Sarana dan Prasarana				
4	TB.03	Pengembangan Perkaderan UMK	Biasa/Terbuka	Eslon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Deputi SDM
	TB.03.00	1 Penyuluhan a Penyelenggara b Materi Penyuluhan				
	TB.03.01	2 Perkaderan a Penilaian b Pengembangan				
	TB.03.02	3 Kerja Sama dan Jaringan a Lembaga Pemerintah b Lembaga Non Pemerintah				
J	RU	RESTRUKTURISASI USAHA				
1	RU.00	Produktifitas dan Mutu	Biasa/Terbuka	Eslon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Asdep Produktifitas dan Mutu
	RU.00.00	1 Produktifitas a Inkubator Teknologi b Pengembangan Klaster				
	RU.00.01	2 Peningkatan Mutu a Disain				

- 57 -

NO.	KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN/ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		b Standarisasi				
	RU.00.02	3 Sertifikasi Produk a Sertifikasi b Label dan Merek				
	RU.00.03	4 Peringatan Dini Restrukturisasi Usaha a Peringatan Dini Restrukturisasi Usaha Koperasi b Peringatan Dini Restrukturisasi Usaha UMKM				
	RU.00.04	5 Standarisasi Restrukturisasi Usaha a Standarisasi Restrukturisasi Usaha Koperasi b Standarisasi Restrukturisasi Usaha UMKM				
	RU.00.05	6 Pengembangan Skema Restrukturisasi Usaha a Pengembangan Skema Restrukturisasi Usaha Koperasi b Pengembangan Skema Restrukturisasi Usaha UMKM				
2	RU.01	Restrukturisasi Usaha	Terbatas	Eslon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Asdep Restrukturisasi Usaha
	RU.01.00	1 Restrukturisasi Manajemen a Manajemen Koperasi b Manajemen UKM				
	RU.01.01	2 Restrukturisasi Pendanaan a Pendanaan Koperasi b Pendanaan UKM				
	RU.01.02	3 Restrukturisasi Kelembagaan a Restrukturisasi Kelembagaan Koperasi b Restrukturisasi Kelembagaan UKM				
	RU.01.03	4 Pendampingan Usaha Terpadu a Pendampingan Usaha Koperasi b Pendampingan Usaha UMKM				
	RU.01.04	5 Kelembagaan Pendamping Usaha a Kelembagaan Pendamping Usaha Koperasi b Kelembagaan Pendamping Usaha UMKM				
	RU.01.05	6 Kerjasama Pendamping Usaha a Pengembangan Kerjasama Pendampingan Usaha b Pengembangan Jaringan Pendamping Usaha				
3	RU.02	Pemberdayaan Lembaga Pengembangan Bisnis (LPB)	Biasa/Terbuka	Eslon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Asdep Pemberdayaan LPB
	RU.02.00	1 Kelembagaan Lembaga Pengembangan Bisnis (LPB) a Asosiasi dan Manajemen LPB b Akreditasi LPB				
	RU.02.01	2 Pengembangan Bisnis LPB a Peningkatan Kerja Sama LPB b Kerja Sama Layanan LPB				
	RU.02.02	3 Pengembangan Jaringan LPB				

- 58 -

NO.	KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN/ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	RU.02.03	a Kerja Sama Kelembagaan LPE b Kerja Sama Sarana dan Teknologi				
	RU.02.04	4 Fasilitasi Mitigasi Resiko Usaha Dampak Globalisasi a FMRU Dampak Globalisasi Koperasi b FMRU Dampak Globalisasi UMKM 5 Perlindungan Legalitas Usaha dan Dampak Bencana a Perlindungan Legalitas Usaha b Perlindungan Dampak Bencana				
4	RU.03	Fasilitas Investasi UMKM	Biasa/Terbuka	Eslon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Asdep Fasilitasi Investasi UMKM
	RU.03.00	1 Investasi Klaster UMKM a Fasilitas Investasi UMKM Agro Bisnis b Fasilitas Investasi UMKM Non Agro Bisnis				
	RU.03.01	2 Pengembangan Kerja Sama Investasi Usaha a Pengembangan Pangan b Pengembangan Non Pangan				
	RU.03.02	3 Fasilitas Investasi Aneka Usaha UMKM a Fasilitas Investasi Usaha Koperasi b Fasilitas Investasi Usaha UKM				
	RU.03.03	4 Fasilitasi Kerjasama Investasi a Fasilitasi Kerjasama Investasi Bilateral b Fasilitasi Kerjasama Investasi Multilateral				
	RU.03.04	5 Fasilitasi Investasi Produk Unggulan a Penguatan Kluster b Fasilitas Investasi Dursa Berjangka				
	RU.03.05	6 Fasilitasi Pencadangan Usaha a Pencadangan Usaha Koperasi b Pencadangan Usaha UMKM				
5	RU.04	Pengembangan Sistem Bisnis	Terbatas	Eslon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Asdep Pengembangan Sistem Bisnis
	RU.04.00	1 Fasilitasi Transaksi a Dalam Negeri b Luar Negeri				
	RU.04.01	2 Kerja Sama Usaha a Pertukaran Koperasi b Pertukaran UKM				
	RU.04.02	3 Jaringan Komunikasi Bisnis a Pengembangan Sarana Komunikasi Bisnis b Komunikasi Bisnis				
	RU.04.03	4 Pemantauan Kemitraan Usaha a Pemantauan Kemitraan Usaha Koperasi b Pemantauan Kemitraan Usaha UMKM				

- 59 -

NO.	KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN/ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
K	PW	PENGAWASAN				
1	PW.00	Kepatuhan	Terbatas	Eslon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Asdep Kepatuhan
	FW.00.00	1 Kepatuhan Legal a Penerapan Peraturan dan Hukum b Evaluasi Penerapan Peraturan dan Hukum				
	FW.00.01	2 Kepatuhan Usaha dan Keuangan a Kepatuhan Usaha b Kepatuhan Keuangan				
	FW.00.02	3 Kepatuhan Transaksi a Pencegahan Transaksi Mencurigakan b Analisa dan Pelaporan				
2	PW.01	Pemeriksaan Kelembagaan	Terbatas	Eslon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Asdep Pemeriksaan Kelembagaan
	FW.01.00	1 Pemeriksaan Organisasi a Pemeriksaan Manajemen Organisasi b Pemeriksaan Manajemen Usaha				
	FW.01.01	2 Pemeriksaan Kinerja a Pemeriksaan Kinerja Kelembagaan b Pemeriksaan Kinerja Keuangan				
	FW.01.02	3 Pemeriksaan Laporan Keuangan a Pemeriksaan Internal b Pemeriksaan Eksternal				
3	PW.02	Pemeriksaan Usaha Simpan Pinjam	Terbatas	Eslon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Asdep Pemeriksaan Usaha SP
	FW.02.00	1 Pemeriksaan Usaha Simpan Pinjam Konvensional a Pemeriksaan Penghimpunan Dana b Pemeriksaan Penyaluran Dana				
	FW.02.01	2 Pemeriksaan Usaha Simpan Pinjam Syariah a Pemeriksaan Penghimpunan Dana b Pemeriksaan Pembiayaan				
	FW.02.02	3 Pemeriksaan Laporan Keuangan Simpan Pinjam a Audit Financial b Audit Khusus				
4	PW.03	Penilaian Kesehatan Usaha Simpan Pinjam	Biasa/Terbuka	Eslon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian KUKM	Asdep Penilaian Kesehatan Usaha SP
	FW.03.00	1 Penilaian Kesehatan Usaha Simpan Pinjam Konvensional a Penilaian Kesehatan KSP b Penilaian Kesehatan USP Koperasi				
	FW.03.01	2 Penilaian Kesehatan Usaha Simpan Pinjam Syariah a Penilaian Kesehatan KSP Pola Syariah b Penilaian Kesehatan USP Pola Syariah				
	FW.03.02	3 Tindak Lanjut Penilaian Kesehatan				

- 60 -

NO.	KLASIFIKASI	JENIS DOKUMEN/ ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		a Pelaksanaan Rekomendasi b Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi				
5	PW.04 PW.04.00 PW.04.01 PW.04.02	Penerapan Sanksi 1 Pelaksanaan Sanksi a Sanksi Administrasi b Pelimpahan Perkara 2 Pemantauan a Pemantauan Pelaksanaan Sanksi b Pemantauan Keputusan Hasil 3 Rehabilitasi a Rehabilitasi Kelembagaan b Rehabilitasi Usaha	Terbatas	Eslon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Adeq Penerapan Sanksi
L	SA	STAF AHLI MENTERI	Terbatas	Eslon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian KUKM	Seluruh Staf Ahli Menteri
1.	SA.00	1 Ekonomi Makro				
2.	SA.01	2 Produktivitas dan Daya Saing				
3.	SA.02	3 Hubungan Antar Lembaga				

MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA,

AAGN. PUSPAYOGA